

## **Pengaruh Faktor UMR, Tingkat Inflasi dan Pengeluaran Per Kapita terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Jambi**

**Roby Septia Pratama<sup>1</sup>, Eja Armaz Hardi<sup>2</sup>, Agusriandi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : robyseptiapratama@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini berjudul Pengaruh Faktor UMR, Tingkat Inflasi Dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Jambi. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menjelaskan pengaruh secara parsial UMR, tingkat inflasi dan pengeluaran per kapita terhadap tingkat kemiskinan masyarakat Kota Jambi. 2) Untuk menjelaskan pengaruh secara simultan UMR, tingkat inflasi dan pengeluaran per kapita terhadap tingkat kemiskinan masyarakat Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah: 1) Dari hasil uji regresi ditemukan bahwa secara parsial UMR tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. 2) Dari hasil uji regresi ditemukan bahwa secara parsial Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. 3) Dari hasil uji regresi ditemukan bahwa secara parsial Pengeluaran Per Kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. 4) Secara simultan, UMR, Inflasi dan Pengeluaran Per Kapita berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kota Jambi.

**Kata Kunci:** UMR, Tingkat Inflasi, Pengeluaran Per Kapita, Kota Jambi

### **Pendahuluan**

Kemiskinan pada dasarnya adalah ketidakmampuan untuk memenuhi suatu standar hidup tertentu. Ukuran kemiskinan yang banyak digunakan di negara berkembang adalah kemiskinan absolut yang membandingkan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga dengan garis kemiskinan. Konsep yang dipakai oleh pemerintah BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan garis kemiskinan digunakan oleh BPS untuk menghitung jumlah penduduk dan rumah tangga miskin, didapatkan dari hasil survey modul konsumsi Susenas yang ditetapkan setiap tiga tahun sekali baik untuk tingkat nasional maupun tingkat provinsi.<sup>1</sup>

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemiskinan merupakan situasi di mana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan

---

<sup>1</sup> Pemda Kota Jambi, *RJPMD Kota Jambi 2013 - 2018*, (Jambi: Pemda Kota Jambi, 2018), hlm. 13.

dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini tidak serta merta akibat dari malas bekerja, terdapat faktor sosial ekonomi yang melatarbelakangi situasi ini.

Kota Jambi merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jambi, sekaligus sebagai Ibu Kota Provinsi Jambi. Kota Jambi memiliki 11 kecamatan, Kecamatan Alam Barajo yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Paal Merah yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Jambi Selatan, dan Kecamatan Danau Sipin yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Telanaipura.<sup>2</sup> Total jumlah penduduk Kota Jambi tahun 2024 adalah 627.770 jiwa.<sup>3</sup> Populasi penduduk Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.** Populasi Penduduk Kota Jambi 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Kotabaru	84.280
2	Alam Barajo	114.200
3	Jambi Selatan	58.860
4	Paal Merah	111.350
5	Jelutung	60.360
6	Pasar Jambi	11.360
7	Telanaipura	50.020
8	Danau Sipin	44.070
9	Danau Teluk	13.020
10	Pelayangan	13.140
11	Jambi Timur	67.110
Total		627.770

Sumber: BPS Kota Jambi 2024

Kemiskinan di Kota Jambi masih berada pada angka yang paling tinggi di Provinsi Jambi yaitu 50.400 jiwa pada Tahun 2022, 50.090 jiwa pada Tahun 2023 dan 47.250 jiwa pada Tahun 2024. Jumlah penduduk miskin tersebut merupakan yang tertinggi di Provinsi Jambi diantara 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, berada di atas Kabupaten Merangin dengan angka 33.490 jiwa dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 33.120 jiwa. Dengan tingkat kemiskinan tersebut, tentunya menjadi permasalahan dan isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan kedepan.<sup>4</sup> Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

<sup>2</sup> BPS Kota Jambi, *Kota Jambi Dalam Angka 2022*, (Jambi: BPS Kota Jambi, 2022), hlm. 16.

<sup>3</sup> BPS Kota Jambi, hlm. 58.

<sup>4</sup> BPS Provinsi Jambi, "Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kot (Ribu Jiwa), 2020-2022," diakses melalui alamat <https://jambi.bps.go.id/indicator/23/33/1/jumlah-penduduk-miskin-kab-kot.html>, pada tanggal 22 Juli 2024.

**Tabel 2.** Angka Kemiskinan Kota Jambi Tahun 2014 – 2024

Tahun	Kota Jambi
2014	50.950
2015	55.510
2016	51.610
2017	52.080
2018	50.610
2019	48.950
2020	50.440
2021	54.230
2022	50.400
2023	50.090
2024	47.250

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2024

Menurut Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) M. Habibullah menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat ada tiga yaitu: Pertama, Upah Buruh (UMR) dan Pendapatan. Tingkat perubahan rata-rata upah ini berkontribusi pada turun-naiknya kemiskinan di suatu daerah. Kedua, Tingkat Inflasi dan Harga Eceran bahan-bahan pokok. Tinggi-rendahnya angka inflasi yang menyangkut daya beli masyarakat akan berdampak pada tingkat kemiskinan masyarakat. Ketiga, Pengeluaran Per Kapita Masyarakat. Pengeluaran per kapita masyarakat ini akan berpengaruh juga terhadap angka kemiskinan masyarakat di suatu daerah.<sup>5</sup> Dari paparan Deputi Bidang Statistik Produksi BPS tersebut dapat disimpulkan ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap angka kemiskinan masyarakat yaitu Faktor UMR, Faktor Inflasi dan Faktor Pengeluaran Per Kapita.

UMR atau Upah Minimum Regional yakni sistem pengupahan yang bertumpu pada upah minimum yang berlandaskan pada kebutuhan hidup layak buruh/pekerja lajang dengan masa kerja di bawah satu tahun. Belum mencangkup mereka yang sudah bekerja di atas 1 (satu) tahun dan berkeluarga.<sup>6</sup> Regulasi terkait mekanisme penetapan upah diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan sistematika sebagai berikut; 1) Penetapan upah minimum di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. 2) Penetapan upah melalui kesepakatan kolektif. 3) Penerapan struktur dan skala upah. 4) Peninjauan Upah Secara Berkala.<sup>7</sup>

Tekait dengan pengaruh inflasi terhadap kemiskinan juga menunjukkan keragaman dalam hasil penelitian. Penelitian dari Rudy Susanto dan Indah Pangesti

<sup>5</sup> Rahma Anjaeni, "Tiga faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan versi BPS," diakses melalui alamat <https://nasional.kontan.co.id/news/enam-faktor-yang-mempengaruhi-tingkat-kemiskinan-versi-bps>, diakses pada 22 Juli 2024.

<sup>6</sup> Edy Priyono, "Kebijakan Upah Minimum Indonesia," *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 7, No. 2, (2023), hlm. 1.

<sup>7</sup> Edy Priyono, hlm. 8.

dengan judul “Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia” menyimpulkan bahwa Inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.<sup>8</sup> Sementara penelitian yang dilakukan oleh Dermawati Sitanggang, Grace Yosia Ambarita dan Rizky Fadly, dengan judul “Analisis Pengaruh Inflasi dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Tahun 2012-2023” menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2022.<sup>9</sup>

Sementara itu, terkait dengan pengaruh pengeluaran perkapita terhadap kemiskinan juga menunjukkan keragaman dalam hasil penelitian. Penelitian dari Ropikatul Hasanah, Syaparuddin dan Rosmeli dengan judul “Pengaruh angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi” menyimpulkan bahwa pengeluaran perkapita berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.<sup>10</sup> Sementara penelitian yang dilakukan oleh Neni Kristiana, dengan judul “Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2019” menyimpulkan bahwa pengeluaran per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2019.<sup>11</sup>

## Tinjauan Literatur

Menurut BPS, faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat adalah: Pertama, Upah Buruh (UMR) dan Pendapatan. Tingkat perubahan rata-rata upah ini berkontribusi pada turun-naiknya kemiskinan di suatu daerah. Kedua, Tingkat Inflasi dan Harga Eceran bahan-bahan pokok. Tinggi-rendahnya angka inflasi yang menyangkut daya beli masyarakat akan berdampak pada tingkat kemiskinan masyarakat. Ketiga, Pengeluaran Per Kapita Masyarakat. Pengeluaran per kapita masyarakat ini akan berpengaruh juga terhadap angka kemiskinan masyarakat di suatu daerah.<sup>12</sup> Dari paparan tersebut dapat disimpulkan ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap angka kemiskinan masyarakat yaitu Faktor UMR, Faktor Inflasi dan Faktor Pengeluaran Per Kapita.

Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat ada tiga yaitu: Pertama, Upah Buruh (UMR) dan Pendapatan. Tingkat perubahan rata-rata upah ini

---

<sup>8</sup> Rudy Susanto dan Indah Pangesti, "Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, Vol. 1, No. 4, (2020).

<sup>9</sup> Dermawati Sitanggang dkk, "Pengaruh angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi," *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Vol.10. No.3, (2021).

<sup>10</sup> Ropikatul Hasanah dkk, "Pengaruh Dana Zakat Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskina Di Provinsi Aceh," *Universitas Kuala Syiah Banda Aceh*, Vol. 1, No. 4, (2023), hlm. 44-45.

<sup>11</sup> Neni Kristiana, "Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2019," *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, Vol 2/ No.3/, (2021).

<sup>12</sup> Rahma Anjaeni, "Tiga faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan versi BPS," diakses melalui alamat <https://nasional.kontan.co.id/news/enam-faktor-yang-mempengaruhi-tingkat-kemiskinan-versi-bps>, diakses pada 22 Juli 2024.

berkontribusi pada turun-naiknya kemiskinan di suatu daerah. Kedua, Tingkat Inflasi dan Harga Eceran bahan-bahan pokok. Tinggi-rendahnya angka inflasi yang menyangkut daya beli masyarakat akan berdampak pada tingkat kemiskinan masyarakat. Ketiga, Pengeluaran Per Kapita Masyarakat. Pengeluaran per kapita masyarakat ini akan berpengaruh juga terhadap angka kemiskinan masyarakat di suatu daerah.<sup>13</sup> Dari paparan Deputy Bidang Statistik Produksi BPS tersebut dapat disimpulkan ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap angka kemiskinan masyarakat yaitu Faktor UMR, Faktor Inflasi dan Faktor Pengeluaran Per Kapita.

UMR atau Upah Minimum Regional yakni sistem pengupahan yang bertumpu pada upah minimum yang berlandaskan pada kebutuhan hidup layak buruh/pekerja lajang dengan masa kerja di bawah satu tahun. Belum mencakup mereka yang sudah bekerja di atas 1 (satu) tahun dan berkeluarga.<sup>14</sup> Regulasi terkait mekanisme penetapan upah diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan sistematika sebagai berikut; 1) Penetapan upah minimum di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. 2) Penetapan upah melalui kesepakatan kolektif. 3) Penerapan struktur dan skala upah. 4) Peninjauan Upah Secara Berkala.<sup>15</sup>

Menurut Edi Suharto, kemiskinan secara umum adalah kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Suharto menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri:

- 1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
- 2) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- 3) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- 4) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun masal.
- 5) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.
- 6) Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- 7) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian sumber alam.
- 8) Ketidak mampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).<sup>16</sup>

Definisi kemiskinan menurut ulama Islam terdapat beberapa perbedaan dalam memahami substansi kemiskinan itu sendiri: Menurut Hanafi dan Miliki memiliki

---

<sup>13</sup> Rahma Anjaeni, "Tiga faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan versi BPS," diakses melalui alamat <https://nasional.kontan.co.id/news/enam-faktor-yang-mempengaruhi-tingkat-kemiskinan-versi-bps>, diakses pada 22 Juli 2024.

<sup>14</sup> Edy Priyono, "Kebijakan Upah Minimum Indonesia," *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 7, No. 2, (2023), hlm. 1.

<sup>15</sup> Edy Priyono, hlm. 8.

<sup>16</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 7.

kesamaan dalam memahami kemiskinan dengan mendefinisikan miskin adalah berarti orang yang tidak memiliki suatu apapun. Menurut Hambali, miskin berarti orang yang mempunyai harta seperdua keperluannya, atau lebih tapi tidak mencukupi. Sedangkan menurut Syafi'i, miskin berarti orang yang mempunyai harta atau usaha seperdua tetapi tidak sampai mencukupi.<sup>17</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik, nilai standar kebutuhan minimum makanan mengacu pada harga dan tingkat konsumsi bahan makanan dengan batas kecukupan makanan yang mampu menghasilkan energi 2.100 kalori/hari. Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan.

Penyebab kemiskinan menurut Suharto yaitu: Pertama Faktor Individual, terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis individu yang miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari individu yang miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupan. *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumberdaya manusia rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. *Ketiga*, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.<sup>18</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propenas, menyebutkan bahwa, berdasarkan penyebabnya kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang disebabkan oleh; sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif; keterbatasan sumber daya dan keterisolasian dan rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat.<sup>19</sup>

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Menurut Sadono Sukirno adalah pembayaran kepada pekerja - pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu dan buruh kasar.<sup>20</sup> Dalam suatu hubungan kerja, sistem perupahan merupakan suatu hal yang memegang peranan yang sangat penting. Seolah-olah merupakan jembatan penghubung antara pemilik modal, atasan maupun pekerja untuk mencapai tujuan perusahaan.

Terkait peraturan pelaksanaan berkaitan dengan upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Aturan turunan

<sup>17</sup> Eja Armaz Hardi, "Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardul Hasan," diakses melalui alamat [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=XmXzxc0AAAAJ&citation\\_for\\_view=XmXzxc0AAAAJ:d1gkVwhDpl0C](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=XmXzxc0AAAAJ&citation_for_view=XmXzxc0AAAAJ:d1gkVwhDpl0C), hlm. 4.

<sup>18</sup> Kuncoro Mudarajad, *Otonomi Dan Pembangunan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2019), hlm. 30.

<sup>19</sup> Abubakar Hamzah dkk, "Pengaruh Dana Zakat Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskina Di Provinsi Aceh," *Universitas Kuala Syiah Banda Aceh*, Vol. 1, No. 4, (2023), hlm. 44-45.

<sup>20</sup> DPR RI, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Jakarta: DPR RI, 2003), hlm. 3.

dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu diteken pada 2 Februari 2021. Dalam peraturan ini, Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman di suatu wilayah. Upah minimum menjadi batas bawah nilai upah karena aturan melarang pengusaha membayar upah pekerjanya lebih rendah dari Upah Minimum.

Upah minimum terdiri atas: (a) upah minimum provinsi; dan (b) upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Selain itu, upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah dengan mempertimbangkan; kebutuhan hidup pekerja, indeks harga konsumen, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dsbnya.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.<sup>21</sup>

Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga. Inflasi adalah kondisi kenaikan barang dan jasa yang diukur selama satu tahun oleh lembaga statistik negara. Di Indonesia, peran ini dipegang oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS bertugas untuk dibandingkan dengan harga-harga sekarang dengan periode sebelumnya untuk mengukur tingkat inflasi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Pengeluaran konsumsi perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pembangunan manusia akan menyebabkan pendapatan perkapita suatu masyarakat bertambah terus-menerus dalam jangka panjang, sehingga pengeluaran perkapita juga mengalami peningkatan.<sup>22</sup> Pengeluaran per kapita sebagai acuan dalam melihat bagaimana suatu rumah tangga mengeluarkan biaya untuk memenuhi konsumsi rumah tangga baik berupa barang-barang maupun jasa untuk kebutuhan sehari-hari pada periode tertentu.<sup>23</sup> Apabila pengeluaran perkapita suatu masyarakat yang telah ditetapkan perhitungannya, maka negara atau wilayah tersebut masih berada pada garis kemiskinan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai paritas daya beli.

---

<sup>21</sup> Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya Pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 115.

<sup>22</sup> BPS Provinsi Jambi, *Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Jambi 2016*, (Jambi: BPS Provinsi Jambi, 2016), hlm. 9.

<sup>23</sup> Muhamad Abdul Halim, *Teori Ekonomika*, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2022), hlm. 47.

### Metode Penelitian

Menurut Sugiyono Pengertian metode penelitian memiliki peranan penting bagi seorang peneliti untuk mencapai tujuan tertentu dan menemukan jawaban atas pertanyaan atau masalah yang diajukan. Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan juga harus bersifat ilmiah dan sesuai dengan fakta di lapangan. Metode penelitian merupakan ilmu yang menerangkan bagaimana suatu penelitian itu dilakukan. Ruang lingkup penelitian termasuk filosofi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, pengambilan sampel dan pertimbangan etika. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada pengumpulan dan analisis data berbentuk angka (numerik) untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena yang diminati.<sup>24</sup> Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal yang diolah dengan metode statistik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Data sekunder merupakan data primer yang telah di olah lebih lanjut dan di sajikan baik oleh pihak-pihak pengumpul data primer.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data sekunder dari BPS Provinsi dan Kota Jambi, Laporan Bank Indonesia dan Data Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja. Data sekunder tersebut berupa data UMR Kota Jambi, data Inflasi Kota Jambi, data pengeluaran masyarakat Kota Jambi dan data kemiskinan Kota Jambi tahun 2012-2023.

**Tabel 3.** Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi
1	UMR (X1)	Kepanjangan UMR adalah Upah Minimum Regional, sedangkan pengertian gaji UMR adalah ukuran standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai patokan pemilik usaha dalam memberikan gaji atau upah pada karyawan. Adanya UMR Indonesia berguna dalam menjamin karyawan memperoleh upah yang layak. Pengertian lainnya, UMR adalah nominal upah yang diterima karyawan berdasarkan daerah mereka dipekerjakan.

<sup>24</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 194.

<sup>25</sup> Ronny Koantur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PPM, 2017), hlm. 182.

<sup>26</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 42.

		Sehingga besaran UMR tentu berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. <sup>27</sup>
2	Tingkat Inflasi (X2)	Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang-barang pada umumnya secara terus menerus, yang disebabkan oleh karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak dibandingkan dengan barang dan jasa yang tersedia. <sup>28</sup>
3	Pengeluaran Per Kapita (X3)	Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi anggota rumah tangga pada periode tertentu. <sup>29</sup>
4	Kemiskinan (Y)	Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Dalam mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia terdapat dua jenis data kemiskinan yang digunakan yaitu kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi. <sup>30</sup>

### Hasil dan Pembahasan

Kota Jambi sebagai pusat wilayah dan Ibukota Provinsi Jambi, secara geografis terletak pada koordinat 01°32'45" sampai dengan 01°41'41' Lintang Selatan dan 103°31'29" sampai dengan 103°40'6" Bujur Timur. Secara administrasi wilayah Kota Jambi berbatasan langsung dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi
- 4) Sebelah Timur berbatsan dengan Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.<sup>31</sup>

**Tabel 4.** Tingkat Ekonomi Per Kecamatan Di Kota Jambi Berdasarkan Jumlah Keluarga Prasejahtera

<sup>27</sup> DPR RI, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Jakarta: DPR RI, 2003), hlm. 3.

<sup>28</sup> Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya Pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 115.

<sup>29</sup> BPS Provinsi Jambi, *Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Jambi 2016*, (Jambi: BPS Provinsi Jambi, 2016), hlm. 9.

<sup>30</sup> Pemda Kota Jambi, *RJPMD Kota Jambi 2013 - 2018*, (Jambi: Pemda Kota Jambi, 2018), hlm. 13.

<sup>31</sup> BPS Kota Jambi, *Kota Jambi Dalam Angka 2023*, (Jambi: BPS Kota Jambi, 2023), hlm. 4.

No	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Keluarga Prasejahtera	Persentase Keluarga Prasejahtera	Persentase Keluarga Sejahtera
1.	Telanaipura	12.082	53	0,44	99,56
2.	Kotabaru	26.687	-	-	-
3.	Jambi Timur	66.124	214	0,32	99,68
4.	Jambi Selatan	11.129	130	1,17	98,83
5.	Jelutung	29.293	2.137	7,29	92,71
6.	Pasar Jambi	3.637	12	0,33	99,67
7.	Danau Sipin	62.906	111	0,18	99,82
8.	Danau Teluk	12.822	648	5,05	94,95
9.	Pelayangan	2.589	-	-	-
10.	Alam Barajo	36.065	-	-	-
11.	Paal Merah	64.213	1324	2,06	97,94

Sumber: BPS Kota Jambi 2023

Jika dilihat data per kecamatan, jumlah keluarga prasejahtera tertinggi di Kota Jambi berada di Kecamatan Jelutung, dengan persentase keluarga prasejahtera sebesar 7,29% atau 92,71% keluarga sejahtera.<sup>32</sup> Jumlah penduduk prasejahtera terendah di Kota Jambi berada di Kecamatan Danau Sipin, dengan persentase keluarga prasejahtera sebesar 0,18% atau 99,82% keluarga sejahtera.<sup>33</sup> Sementara Jumlah keluarga sejahtera menengah di Kota Jambi berada di Kecamatan Telanaipura, dengan persentase keluarga prasejahtera sebesar 0,44% atau 99,56% keluarga sejahtera.<sup>34</sup> Tiga kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Danau Sipin, Kecamatan Jelutung dan Kecamatan Telanaipura menjadi objek penelitian pada penelitian ini sebagai kecamatan dengan tingkat ekonomi tertinggi, menengah dan terendah di Kota Jambi.

Statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan jumlah data (N) yang digunakan dalam penelitian ini serta dapat menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean) serta standar deviasi ( $\delta$ ) dari masing-masing variabel. Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap temuan-temuan empiris mengenai pengaruh variabel UMR (X1) Inflasi (X2) dan Pengeluaran Per Kapita (X3) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). Adapun hasil olahan statistik deskriptif data yang menjadi variabel penelitian disajikan dalam tabel 4.6 sebagai berikut:

**Tabel 5.** Hasil Analisis Deskriptif Data

	X1	X2	X3	Y
Mean	2091500.	3.806667	11532.41	51605.00

<sup>32</sup> BPS Kota Jambi, *Kecamatan Danau Sipin Dalam Angka: 2020*, (Jambi: BPS-Statistics, 2020), hlm. 61.

<sup>33</sup> BPS Kota Jambi, *Kecamatan Jelutung Dalam Angka: 2020*, (Jambi: BPS-Statistics, 2020), hlm. 60.

<sup>34</sup> BPS Kota Jambi, *Kecamatan Telanaipura Dalam Angka: 2020*, (Jambi: BPS-Statistics, 2020), hlm. 54.

Median	2153000.	3.090000	11780.00	50780.00
Maximum	2943000.	8.740000	12783.00	55510.00
Minimum	1142000.	1.270000	10073.44	48950.00
Std. Dev.	585344.1	2.510488	944.5010	2033.718
Skewness	-0.236691	1.174951	-0.381756	0.756879
Kurtosis	1.804740	3.184593	1.760597	2.308264
Jarque-Bera	0.826368	2.778058	1.059534	1.384980
Probability	0.661540	0.249317	0.588742	0.500329
Sum	25098000	45.68000	138389.0	619260.0
Sum Sq. Dev.	3.77E+12	69.32807	9812904.	45496100
Observations	12	12	12	12

Sumber : Data Primer diolah , 2024

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.6 tersebut menerangkan bahwa Kota Jambi yang menjadi sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode pooled data, dimana 1 objek penelitian dikalikan periode tahun pengamatan (12 tahun), sehingga observasi dalam penelitian ini menjadi  $1 \times 12 = 12$  sampel observasi.

Variabel UMR mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 2.091.500 dengan nilai minimum sebesar Rp. 1.142.000 dan nilai maksimum Rp. 2.943.000. Dengan melihat nilai mean (rata-rata), maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik tingkat UMR Kota Jambi selama periode 2012-2023, angka rata-rata UMR lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar Rp. 585.344. Hal ini menunjukkan angka UMR di Kota jambi periode 2012-2023 terbilang tinggi.

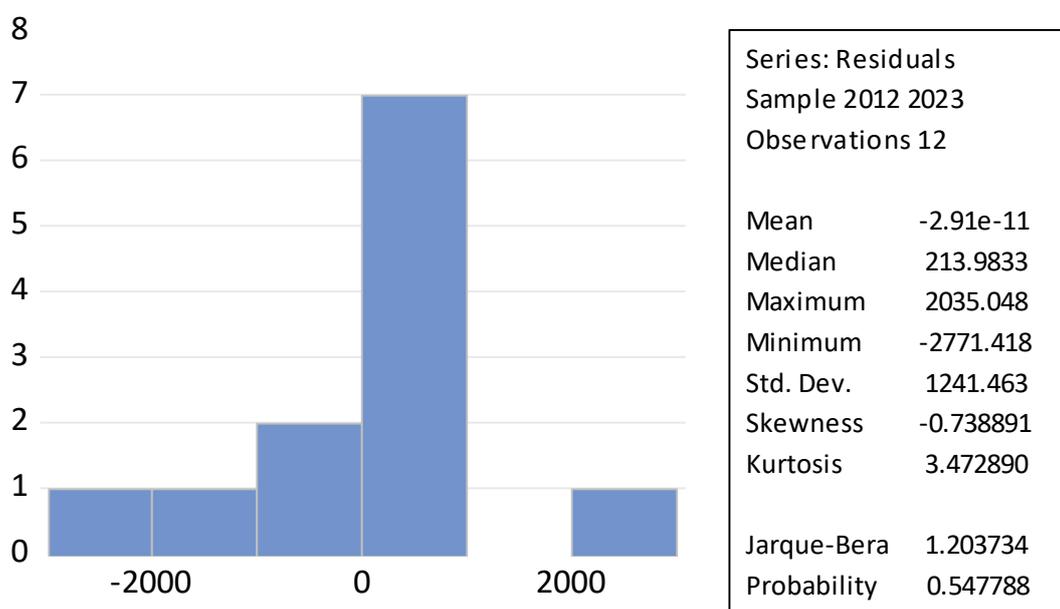
Variabel Inflasi mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 3.81 dengan nilai minimum sebesar 1.27 dan nilai maksimum 8.74. Dengan melihat nilai mean (rata-rata), maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik tingkat Inflasi Kota Jambi selama periode 2012-2023, angka rata-rata Inflasi lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 2.51. Hal ini menunjukkan angka Inflasi Kota Jambi periode 2012-2023 terbilang tinggi.

Variabel Pengeluaran Per Kapita mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 11.532 dengan nilai minimum sebesar Rp. 10.073 dan nilai maksimum sebesar Rp. 12783. Dengan melihat nilai mean (rata-rata), maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik

tingkat Pengeluaran Per Kapita Kota Jambi selama periode 2012-2023, angka rata-rata Pengeluaran Per Kapita lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar Rp. 944. Hal ini menunjukkan angka Pengeluaran Per Kapita Kota Jambi periode 2012-2023 terbilang tinggi.

Sedangkan Variabel Tingkat Kemiskinan periode 2012-2023, pada uji deskriptif data memperoleh nilai minimum sebanyak 48.950 jiwa, nilai maksimum sebanyak 55.510 jiwa dengan rata-rata (mean) sebanyak 51.605 jiwa dan standar deviasi 2.033, dan lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan Kota Jambi periode 2012-2023 dikategorikan tinggi.

**Gambar 1.** Grafik *Normal Probability Plot* Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan gambar 4.1 hasil uji normalitas bahwa nilai *probability* sebesar 0,5477888. Kerena nilai prob. 0,5477888 > 0,05 maka data berdistribusi normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi berdistribusi normal dalam model.

Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan *Glejser Heteroskedasticity Test*. Dalam Uji Gletser variabel dependennya diganti dengan nilai *absolute residual*. Dengan persamaan  $resabs = abs(resid)$ . Hasil yang diperlukan dari hasil uji ini apabila jika koefisien variabel independen signifikan secara statistik, maka mengindikasi terdapat heteroskedastisitas dalam model. Berikut tabel 4.7 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas:

**Tabel 6.** Hasil Uji Heteroskedastisitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.596009	0.982219
X2	-0.596009	1.000000	-0.650300
X3	0.982219	-0.650300	1.000000

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa seluruh variabel dengan probabilitas 0,05 lebih dari 0,05 ( $p\text{-value} > 0,05$ ). Dapat disimpulkan bahwa uji Glejser mengindikasikan adanya homoskedastisitas atau tidak mengandung heteroskedastisitas.

Uji parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan indikator probabilitas yaitu apabila  $p\text{-value} < \text{tingkat signifikansi } (\alpha) 0,10$  berarti variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Begitu pun sebaliknya apabila nilai  $p\text{-value} > \text{tingkat signifikansi } (\alpha) 0,10$  berarti tidak ada pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependennya. Berikut ini hasil uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t).

**Tabel 7.** Hasil Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Dependent Variable: Y  
 Method: Least Squares  
 Sample: 2012 2023  
 Included observations: 12

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	100706.9	23626.38	4.262475	0.0028
X1	0.004344	0.004186	1.037624	0.3298
X2	-786.5635	241.2246	-3.260710	0.0115
X3	-4.785904	2.742372	-1.745170	0.1191
R-squared	0.627363	Mean dependent var		51605.00
Adjusted R-squared	0.487624	S.D. dependent var		2033.718
S.E. of regression	1455.745	Akaike info criterion		17.66562
Sum squared resid	16953537	Schwarz criterion		17.82726
Log likelihood	-101.9937	Hannan-Quinn criter.		17.60578
F-statistic	4.489535	Durbin-Watson stat		1.390686
Prob(F-statistic)	0.039718			

Sumber: Data diolah, 2024

1. Pengaruh UMR terhadap Tingkat Kemiskinan. Variabel UMR nilai probabilitas (prob) sebesar 0.3298 yang lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,10, ( $0.3298 > 0,10$ ) sehingga  $H_{a1}$  ditolak. Dalam hal ini menandakan bahwa variabel UMR secara individu (parsial) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Jambi selama periode 2012-2023.
2. Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan. Variabel Inflasi dengan nilai probabilitas (prob) sebesar 0.0115 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,10 ( $0.0115 < 0,10$ ) sehingga  $H_{a2}$  diterima. Dalam hal ini menandakan bahwa variabel

Inflasi secara individu (parsial) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Jambi selama periode 2012-2023.

3. Pengaruh Pengeluaran Per Kapita terhadap Tingkat Kemiskinan. Variabel Pengeluaran Per Kapita dengan nilai probabilitas (prob) sebesar 0.1191 yang lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,10, ( $0.1191 > 0,10$ ) sehingga  $H_{a3}$  ditolak. Dalam hal ini menandakan bahwa variabel Pengeluaran Per Kapita secara individu (parsial) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Jambi selama periode 2012-2023.

Uji simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen.<sup>35</sup> Apabila p-value  $< 0,10$  maka  $H_0$  ditolak dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Begitu pun sebaliknya apabila nilai p-value  $> 0,10$  maka  $H_0$  diterima. Berikut ini hasil uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).

**Tabel 8.** Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Dependent Variable: Y  
 Method: Least Squares  
 Sample: 2012 2023  
 Included observations: 12

R-squared	0.627363	Mean dependent var	51605.00
Adjusted R-squared	0.487624	S.D. dependent var	2033.718
S.E. of regression	1455.745	Akaike info criterion	17.66562
Sum squared resid	16953537	Schwarz criterion	17.82726
Log likelihood	-101.9937	Hannan-Quinn criter.	17.60578
F-statistic	4.489535	Durbin-Watson stat	1.390686
Prob(F-statistic)	0.039718		

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji F diatas, nilai probabilitas (prob) sebesar 0.039718 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,10. sehingga  $H_0$  diterima. Dalam hal ini menandakan bahwa UMR, Inflasi dan Pengeluaran Per Kapita secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Jambi selama periode 2012-2023. Sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

Penelitian dengan regresi times series digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil Eviews 12 pada tabel 4.9 diatas, maka didapatkan persamaan model regresi antara UMR, Inflasi dan Pengeluaran Per Kapita terhadap Tingkat Kemiskinan adalah sebagai berikut:

Estimation Command:  
 =====  
 LS Y C X1 X2 X3

<sup>35</sup> Ghozali, Hlm. 56.

Estimation Equation:

$$Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2 + C(4)*X3$$

Substituted Coefficients:

$$Y = 100706.86433 + 0.00434393415712*X1 - 786.563533375*X2 - 4.78590350867*X3$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Konstanta sebesar 100706.86433 menunjukkan bahwa jika variabel independen (X1,X2,X3) pada observasi ke i dan periode t dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka Tingkat Kemiskinan sebesar 100.706.
- 2) Jika nilai UMR pada observasi ke i dan periode t naik sebesar 1% akan meningkatkan Tingkat Kemiskinan pada observasi ke i dan periode ke t sebesar 0.004 apabila nilai variabel independen lainnya dianggap konstan. Hal ini dapat diartikan ketika nilai UMR tinggi maka tingkat Tingkat Kemiskinan akan naik, karenanya nilai UMR yang tinggi menunjukkan hasil yang baik.
- 3) Jika nilai Inflasi pada observasi ke i dan periode t naik sebesar 1% akan menurunkan Tingkat Kemiskinan pada observasi ke i dan periode ke t sebesar 786.56 apabila nilai variabel independen lainnya dianggap konstan. Hal ini dapat diartikan ketika nilai Inflasi tinggi maka tingkat Tingkat Kemiskinan akan naik.
- 4) Jika nilai Pengeluaran Per Kapita pada observasi ke i dan periode t naik sebesar 1% akan meningkatkan Tingkat Kemiskinan pada observasi ke i dan periode ke t sebesar 4.79 apabila nilai variabel independen lainnya dianggap konstan.

**Tabel 9.** Koefisien Determinasi

Dependent Variable: Y  
 Method: Least Squares  
 Sample: 2012 2023  
 Included observations: 12

R-squared	0.627363	Mean dependent var	51605.00
Adjusted R-squared	0.487624	S.D. dependent var	2033.718
S.E. of regression	1455.745	Akaike info criterion	17.66562
Sum squared resid	16953537	Schwarz criterion	17.82726
Log likelihood	-101.9937	Hannan-Quinn criter.	17.60578
F-statistic	4.489535	Durbin-Watson stat	1.390686
Prob(F-statistic)	0.039718		

Sumber: Data diolah , 2024

Berdasarkan tabel 4.10 diatas besarnya angka Adjusted R-squared adalah 0.487624. Hal ini menjelaskan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 48,76% yang mana dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan 48,76%

terhadap variabel dependennya. Sedangkan sisanya ( $100\% - 48,76\% = 51,24\%$ ) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain dari luar model variabel penelitian ini.

### 1. Pengaruh UMR Terhadap Kemiskinan di Kota Jambi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMR tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. Hasil tersebut berdasarkan Uji t yang dilakukan menunjukkan nilai *p-value* lebih besar dari nilai signifikansi 0,10. Hal ini berarti bahwa ketika UMR meningkat, maka intensitas Kemiskinan di Kota Jambi tidak akan meningkat dengan signifikan. Atau sebaliknya, ketika UMR menurun, maka intensitas Kemiskinan di Kota Jambi juga tidak akan menurun dengan signifikan.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wafirrotullaela dan Anton Bawono dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kab./Kota di Jawa Tengah" menyimpulkan bahwa UMR berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di 35 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.<sup>36</sup> Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dari Rizky Yulita Sutikno, Debby Ch. Rotinsulu dan Steeva Y. L. Tumangkeng, dengan judul "Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara" menyimpulkan bahwa UMR berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.<sup>37</sup>

### 2. Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan di Kota Jambi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. Hasil tersebut berdasarkan Uji t yang dilakukan menunjukkan nilai *P-Value* lebih kecil dari nilai signifikansi 0,10. Hal ini berarti bahwa ketika Inflasi meningkat, maka faktor tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan atau penurunan intensitas Kemiskinan di Kota Jambi.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dermawati Sitanggang, Grace Yosia Ambarita dan Rizky Fadly, dengan judul "Analisis Pengaruh Inflasi dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Tahun 2012-2023" menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2022.<sup>38</sup> Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dari Rudy Susanto dan Indah Pangesti dengan judul "Pengaruh Inflasi Dan

---

<sup>36</sup> Wafirrotullaela dan Anton Bawono, "Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kab./Kota di Jawa Tengah," *Jurnal Masharif al-Syariah*, Volume 8, No. 2, (2023).

<sup>37</sup> Rizky Yulita Sutikno dkk, "Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 19 No. 01, (2019).

<sup>38</sup> Dermawati Sitanggang dkk, "Pengaruh angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi," *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Vol.10. No.3, (2021).

Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia” menyimpulkan bahwa Inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.<sup>39</sup>

### 3. Pengaruh Pengeluaran Per Kapita Terhadap Kemiskinan di Kota Jambi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengeluaran Per Kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. Hasil tersebut berdasarkan Uji t yang dilakukan menunjukkan nilai *p-value* lebih besar dari nilai signifikansi 0,10. Hal ini berarti bahwa ketika Pengeluaran Per Kapita meningkat, maka intensitas Kemiskinan di Kota Jambi tidak akan meningkat dengan signifikan. Atau sebaliknya, ketika Pengeluaran Per Kapita menurun, maka intensitas Kemiskinan di Kota Jambi juga tidak akan menurun dengan signifikan.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Neni Kristiana, dengan judul “Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2019” menyimpulkan bahwa pengeluaran per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2019.<sup>40</sup> Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dari Ropikatul Hasanah, Syaparuddin dan Rosmeli dengan judul “Pengaruh angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi” menyimpulkan bahwa pengeluaran perkapita berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.<sup>41</sup>

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian tentang Pengaruh Faktor UMR, Tingkat Inflasi dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Jambi yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dari hasil uji regresi ditemukan bahwa secara parsial UMR tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. Dari hasil uji regresi ditemukan bahwa secara parsial Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. Dari hasil uji regresi ditemukan bahwa secara parsial Pengeluaran Per Kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kota Jambi.

Secara simultan, UMR, Inflasi dan Pengeluaran Per Kapita berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kota Jambi.

### Daftar Pustaka

---

<sup>39</sup> Rudy Susanto dan Indah Pangesti, "Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, Vol. 1, No. 4, (2020).

<sup>40</sup> Neni Kristiana, "Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2019," *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, Vol 2/ No.3/, (2021).

<sup>41</sup> Ropikatul Hasanah dkk, "Pengaruh Dana Zakat Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskina Di Provinsi Aceh," *Universitas Kuala Syiah Banda Aceh*, Vol. 1, No. 4, (2023), hlm. 44-45.

- Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: Karya Putra, 2018.
- BPS Kota Jambi. *Kecamatan Danau Sipin Dalam Angka: 2022*, Jambi: BPS-Statistics, 2022.
- BPS Kota Jambi. *Kecamatan Jelutung Dalam Angka: 2022*, Jambi: BPS-Statistics, 2022.
- BPS Kota Jambi. *Kecamatan Telanaipura Dalam Angka: 2022*, Jambi: BPS-Statistics, 2022.
- BPS Kota Jambi. *Kota Jambi Dalam Angka 2022*, Jambi: BPS Kota Jambi, 2022.
- BPS Provinsi Jambi. *Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Jambi 2022*, Jambi: BPS Provinsi Jambi, 2022.
- BPS Provinsi Jambi. *Ringkasan Eksekutif Indeks Harga Konsumen Kota Jambi Triwulan II 2022*, Jambi: BPS Provinsi Jambi.
- Darmono, Gujarati. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga, 2018.
- DPR RI. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta: DPR RI, 2003.
- Firdaus, Rachmat dan Ariyanti, Maya. *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya Pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Ghazali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017.
- Gilarso, T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2020.
- Halim, Muhamad Abdul. *Teori Ekonomika*, Tangerang: Jelajah Nusa, 2018.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017.
- Insikindro. *Ekonomi Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPFE, 2020.
- Iskandar. *Metode Penelitian Sosial: Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada Pers, 2018.
- Koantur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2017.
- Mankiw, N. Gregory. *Makroekonomi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016
- Mudarajad, Kuncoro. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2020.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2018.

- Pambudi, Sudiro dkk. *Inflasi Di Indonesia: Karakteristik dan Pengendaliaannya*, Jakarta: BI Institute, 2017.
- Pemda Kota Jambi. *RJPMD Kota Jambi 2013 - 2018*, Jambi: Pemda Kota Jambi, 2018.
- Reksoprayetno, Soediyono. *Ekonomi Makro: Analisis IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregat*, Yogyakarta: BPF, 2017.
- Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*, Jakarta: Rajawali, 2020.
- Sidauruk, Markus. *Kebijakan Pengupahan Di Indonesia; Tinjauan Kritis dan Panduan Menuju Upah Layak*, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Alifia, Afa Rosfalita Nur. "Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesi Tahun 2003-2018," *Universitas Brawijawa Malang*, 2020.
- Budiman, Fajar. *Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2016*, Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2017.
- Cahya, Bayu Tri. "Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Al-Qu'ran Dan Hadist," *Economica*, Vol. 9, No. 2, 2019.
- Fitriyanti. "Analisis Pengaruh Dana Zakat, Tenaga Kerja Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode Tahun 2010-2018," *Institut Agama Islam Negeri Salatiga*, 2019.
- Hamzah, Abu Bakar dkk. "Pengaruh Dana Zakat Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskina Di Provinsi Aceh," *Universitas Kuala Syiah Banda Aceh*, Vol. 1, No. 4, 2018.

- Muhaddisin dan Sartiyah. "Pengaruh Zakat Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh," *Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh*, Vol. 1, No 2, 2019.
- Muna, Mavazal. "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Zakat Terhadap Krmiskinan (Studi Kasus Di 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh)," Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Priyono, Edy. "Kebijakan Upah Minimum Indonesia," *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 7, No. 2, (2018).
- Putra, I Komang Agus Adi. "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkatb Kemiskinan Pada Kabupaten/Kotadi Provinsi Bali," *Unud*, Vol. 7, No. 3, 2018.
- Alaydrus, Hadijah. "Daftar UMP 2021 di 34 Provinsi, Gaji di DKI Jakarta & Papua Terbesar, diakses melalui alamat <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210109/9/1340673/daftar-ump-2021-di-34-provinsi-gaji-di-dki-jakarta-papua-terbesar>.
- Anjaeni, Rahma. "Tiga faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan versi BPS," diakses melalui alamat <https://nasional.kontan.co.id/news/enam-faktor-yang-mempengaruhi-tingkat-kemiskinan-versi-bps>.
- BPS Kota Jambi. "Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) (Ribu Rupiah)", 2020-2022, diakses melalui alamat <https://jambikota.bps.go.id/indicator/26/60/1/pengeluaran-per-kapita-ribu-rupiah-orang-tahun.html>.
- BPS Provinsi Jambi. "Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kot (Ribu Jiwa), 2018-2020," diakses melalui alamat <https://jambi.bps.go.id/indicator/23/33/1/jumlah-penduduk-miskin-kab-kot.html>.
- Hardi, Eja Armaz. "Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardul Hasan," diakses melalui alamat [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=XmXzxk0AAAAJ&citation\\_for\\_view=XmXzxk0AAAAJ:d1gkVwhDpl0C](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=XmXzxk0AAAAJ&citation_for_view=XmXzxk0AAAAJ:d1gkVwhDpl0C).
- Setjen DPR RI. "Dimensi Kemiskinan," diakses melalui alamat [https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn\\_Dimensi\\_Kemiskinan20130130135844.pdf](https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Dimensi_Kemiskinan20130130135844.pdf)